

**UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN
MAMUJU UTARA MENJADI PARIWISATA INTERNASIONAL**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Ilmu Hubungan Internasional Jurusan Ilmu Politik**

Disusun oleh:

Muhammad Jermawan Junaidi

4510023019

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

UNIVERSITAS BOSOWA 45 MAKASSAR

2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	5
1. Batasan Masalah	5
2. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pariwisata	11
B. Pariwisata Internasional	11
1. Kecenderungan Kepariwisata Di Asia Pasifik	13
C. Pengembangan Dan Dampak Pengembangan Pariwisata	13
D. Pengembangan Pariwisata	13
1. Pengembangan Pariwisata	13
2. Dampak Pengembangan Pariwisata	15
E. Kepariwisata Nasional Di Era Otonomi Daerah	16
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju Utara	24
1. Profil Umum	24
2. Tata Ruang Wilayah	26
3. Penduduk, Rumah Tangga Dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga	27
B. Kondisi Pariwisata Kabupaten Mamuju Utara	27
1. Potensi Pariwisata di Kabupaten Mamuju Utara	28
C. Bentuk Kerjasama	36

1. Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Pariwisata	36
2. Bidang Pemasaran dan Promosi	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Daerah	56
1. Peningkatan Sumber Daya yang Berkualitas	56
2. Sarana dan Prasarana Kepariwisata.....	57
B. Dampak Pengembangan Potensi Pariwisata Internasional	58
1. Dampak Sosial – Ekonomi	58
2. Dampak Pariwisata Terhadap Kebudayaan Lokal	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat obyek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan setiap obyek wisata. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya.

Perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global, telah menuntut agar semua element yang terlibat di dalamnya berfikir serta bertindak cepat didalam merespon perubahan yang terjadi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong proses globalisasi yang begitu cepat menimbulkan ketergantungan antar negara dan antar masalah semakin erat. Hal ini kemudian memunculkan serta memicu terciptanya suatu dunia tanpa batas yang seolah-olah membentuk satu global village bagi masyarakat dunia.

Sejalan dengan itu proses globalisasi dan pelaku hubungan internasional telah melas, tidak hanya melingkupi Negara saja, namun pada actor-aktor selain Negara seperti organisasi internasional, LSM, Perusahaan Multinasional (*MNC's*), daerah, kelompok-kelompok minoritas, bahkan

individu¹. Beragam actor yang terlibat dalam hubungan luar negeri diharapkan dapat mewujudkan suatu diplomasi yang memandang substansi permasalahan Negara integrative dan melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi yang disebut total diplomacy.

Pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian di revisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (pembagian urusan pemerintahan) yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004 membawa dimensi baru bagi kehidupan hubungan luar negeri². Pada dasarnya pelaksanaan politik luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun seiring dengan berlakunya UU Otonomi Daerah tersebut, kebijakan luar negeri dan diplomasi oleh pemerintah pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan luar negeri yang lebih terarah, terpadu, dan berlandaskan kepastian hukum yang lebih kuat, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar Negeri dan UU Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional³. Kedua Undang-Undang yang dimaksud merupakan landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah pusat dan pelaku hubungan

¹ Julius P. Hermawan. Aktor, Isu dan Metodeologi : Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional, Graha Ilmu, Yogyakarta

² Made Leo Wiratma dkk. *Membangun Indonesia dari daerah; PARTISIPASI PUBLIK dan POLITIK ANGGARAN DAERAH*, JICA, Kanisius, Yogyakarta. Hal.37

³ Panduan Umum tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh pemerintah Daerah, Dep.Luar Negeri RI, 2014. Hal.5

luar negeri lainnya, termasuk unsur-unsur daerah, dalam melaksanakan hubungan luar negeri.

Mengingat salah satu peran dan fungsi departemen luar negeri adalah sebagai penunjang suksesnya pemberdayaan potensi daerah, yang direalisasikan melalui kerangka hubungan dan kerja sama luar negeri. Maka, dirasakan urgensinya untuk menciptakan suatu mekanisme komunikasi, koordinasi dan konsultasi yang efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan⁴.

Untuk memperlancar program pembangunan nasional setiap sector yang dianggap berpotensi untuk menopang jalannya pembangunan harus dioptimalkan pengelolaan bahkan pengembangannya. Salah satunya sector pariwisata karena disamping memberikan andil dalam hal pemasukan, pariwisata juga dapat menciptakan integrasi nasional dan persahabatan bangsa-bangsa dengan saling pengertian terhadap cara berpikir dari budaya masing-masing bangsa.

Dalam jangka panjang tujuan pembangunan kepariwisataan nasional dari aspek nasional ekonomi, dapat memberikan pendapatan masyarakat. Perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah dan turut mendorong pembangunan daerah. Selain itu aspek social budaya dapat memperkokoh kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri, membina tradisi dan peninggalan sejarah, merangsang peningkatan kecerdasan bangsa dan mendorong kreasi dan cipta yang baik.

⁴ Op,cit. hal 4

Hal ini lebih tegas dimuat dalam UU No.10 Tahun 2009, pasal 8 ayat 1 tentang pembangunan kepariwisataan⁵, yang disebutkan bahwa :

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk kepariwisataan provinsi dan rencana induk kepariwisataan kabupaten/kota.

Prioritas pengembangan pariwisata yang utama adalah membangun manusianya, terutama masyarakat lokal dan yang langsung berinteraksi dengan wisatawan agar dapat dicapai kesetaraan dan terjadinya saling pertukaran maupun kerjasama yang saling menghargai dan memperkaya kehidupan. Pariwisata dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan hidup dan penghidupan melalui peluang kerja yang tersedia, peningkatan pendapatan, dan membaiknya kualitas hidup masyarakat. Pariwisata juga dapat mengurangi tekanan penduduk dalam mengeksploitasi lahan dan sumber daya lingkungan, yaitu karena adanya diversifikasi mata pencaharian dari pengelolaan dan pelayanan jasa dan pariwisata. Pariwisata telah menjadi aktivitas social ekonomi dominan dewasa ini, bahkan disebut-sebut sebagai “*industry terbesar sejak akhir abad 20*” yang juga menyangkut “pergerakan barang, jasa dan manusia dalam skala terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia⁶. Sejak beberapa dasawarsa terakhir, pariwisata memang telah terbukti menjadi industry terbesar di berbagai belahan dunia.

⁵ Muljadi. A.J., *Kepariwisataan Dan Perjalanan (Lamp. UU tentang pembangunan kepariwisataan)*, Jakarta, Rajawali Pers 2010. Hal. 205

⁶ Ibid, Hal.187

Kegiatan pariwisata memiliki sifat yang berbeda dengan kegiatan ekonomi yang berbasis sumber daya seperti pertanian dan yang melakukan ekstraksi dan eksploitasi sumber daya seperti industry. Pariwisata memerlukan pengelolaan sumber daya alam dan budaya yang berada di suatu wilayah. Dalam pariwisata, yang dijual adalah keindahan objek dan kenyamanan pelayanan sehingga kelestarian objek harus dipertahankan dan kemaslahatan masyarakat setempat harus diutamakan. Artinya, pariwisata memiliki fungsi menjaga dan melestarikan budaya dan sumber daya sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Disamping itu, adanya otonomi daerah memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah lebih memiliki peran dan wewenang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendorong investasi masuk dan mobilitas masyarakat daerah.

Pariwisata di era otonomi berperan penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan wilayah, terutama wilayah terpencil yang memiliki potensi alam dan budaya yang unik. Kecenderungan meningkatnya minat daerah dalam pengembangan kegiatan pariwisata memerlukan perhatian dan penanganan yang seksama. Prakarsa dan inisiatif daerah membangun dirinya dimasa otonomi ini sangat penting bagi konsolidasi strategi nasional dalam pengembangan pariwisata. Jadi jelaslah bahwa potensi yang ada perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya, seperti potensi alam dan budaya yang unik sebagai suatu kekayaan yang dapat dijadikan alat untuk menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia Khususnya Kabupaten Mamuju Utara. Salah satu daerah tujuan wisata Sulawesi Barat

yang memiliki keunikan budaya dengan daya tarik panorama alam yang memukau adalah daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Dengan demikian Kabupaten Mamuju Utara semakin berperan dan berfungsi sebagai daerah tujuan domestic maupun asing, yang mana di Kabupaten Mamuju Utara itu sendiri akan terjadi arus lalu lintas budaya antar bangsa yaitu diluar Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kabupaten Mamuju Utara sebagai salah satu jaringan kontak dan komunikasi pariwisata dan mendapat dampak dan pengaruh baik yang bersifat positif. Seiring dengan apa yang telah dipaparkan diatas, di kalangan masyarakat umum ada anggapan atau asumsi bahwa pariwisata merupakan sumber dari beberapa ketimpangan dalam masyarakat, seperti merosotnya moral, meningkatnya kriminalitas, tingkah laku yang menyimpang, dan lain-lain. Memang benar pariwisata tidak dapat dituding sebagai salah satunya penyebab tingkah laku yang menyimpang dalam masyarakat. Oleh karena masih banyak factor-faktor lain yang menyebabkan tingkah laku dalam masyarakat seperti misalnya, perkembangan ilmu dan teknologi, komunikasi, pertumbuhan ekonomi, termasuk didalamnya pariwisata itu sendiri.

Tetapi apabila pariwisata itu dikelola dengan baik, organisasi yang bagus serta kesiapan masyarakat, peran serta instansi terkait atau swasta maka pariwisata justru membawa manfaat besar. Seperti yang kita lihat sekarang ini perkembangan pariwisata Kabupaten Mamuju Utara dengan meningkatnya arus wisatawan yang diikuti meningkatnya alat transportasi, biro perjalanan, kesibukan-kesibukan baik pemerintah maupun swasta yang

ada kaitannya dengan pariwisata, seperti penyediaan sarana dan prasarana dalam hal ini sarana akomodasi, perbaikan jalan ke objek wisata yang tadinya sukar dilalui para wisatawan, industry kerajinan yang bermunculan dimasyarakat. Tentunya masih banyak usaha/kegiatan yang dilakukan yang kesemuanya ini adalah merupakan usaha pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan dan dari padanya pemerintah bersama masyarakat setempat mendapat keuntungan.

Menyadari akan kedudukan Sulawesi Barat Khususnya Kabupaten Mamuju Utara sebagai salah satu daerah tujuan yang cukup penting di Indonesia Timur, maka perlu adanya penanganan dalam pembinaan dan pengelolaan yang lebih intensif. Terutama dalam masalah organisasi dan aksesibilitas sehingga ada harapan yang lebih memungkinkan untuk pengembangan pariwisata yang lebih memungkinkan untuk pengembangan pariwisata yang lebih produktif dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata. Dimana hasilnya nanti dapat membawa dampak positif terhadap adanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan daerah dan memperkenalkan alam dan budaya Indonesia. Manfaat lain dengan adanya pariwisata di Kabupaten Mamuju Utara adalah meningkatnya pembangunan fisik sarana dan prasarana walaupun dari segi kuantitasnya belum maksimal.

Bertolak dari permasalahan diatas, dalam hal pengembangan kepariwisataan sebagai sector pembangunan di Kabupaten Mamuju Utara,

maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Mamuju Utara menjadi Pariwisata Internasional.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Pariwisata saat ini berperan penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan wilayah, terutama wilayah terpencil yang memiliki potensi alam dan budaya yang unik, dan hal ini yang kemudian perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Fenomena ini juga menunjukkan tingkat kemampuan masyarakat daerah dalam melakukan perjalanan kegiatan pariwisata yang berperan penting, terbukti dengan meningkatnya kegiatan perencanaan dan promosi pariwisata daerah di era otonomi. Pemerintah daerah mulai terbuka melihat potensi ekonomi maupun perannya dalam dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendorong investasi masuk, dan mobilitas masyarakat daerah. Prakasrsa dan inisiatif daerah membangun dirinya di masa otonomi ini sangat penting bagi konsolidasi strategi nasional pengembangan Pariwisata 2020. Dengan demikian manfaat pariwisata itu akan membawa suatu rangkaian kegiatan akan difungsikan oleh pemerintah bersama masyarakat⁷.

Selain itu pariwisata sebagai salah satu sector berpotensi mendatangkan keuntungan buat daerah untuk pendanaan pembangunan apalagi setelah diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

⁷ M.Baiquni, I Putu Anom dkk, *Pariwisata berkelanjutan dalam pusaran krisis global*; Denpasar, Udayana University Press, 2011

Otonomi Daerah, setiap daerah untuk memaksimalkan setiap sumber dayanya.

Berangkat dari hal tersebut diatas maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada proses pengembangan potensi pariwisata Internasional dalam hal ini upaya pemerintah daerah menuju pariwisata internasional.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran pemeritah Kabupaten Mamuju Utara dalam mengembangkan Potensi Pariwisata Internasional ?
- b. Apa dampak yang dihasilkan dari pengembangan potensi pariwisata Internasional di kabupaten Mamuju Utara ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui seberapa besar pengaruh pariwisata internasional terhadap pendapatan daerah
- b. Mengidentifikasi hambatan ata masalah yang dianggap menghambat dan menunjang proses pembangunan potensi pariwisata internasional.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan :

- a. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan, dalam rangka pengambilan kebijakan teristimewa untuk memajukan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan pariwisata internasional yang lebih baik dan terarah
- b. Dapat menjadi bahan kajian bagi mereka berkeinginan mempelajari tentang pariwisata internasional

D. Kerangka Konseptual

Pariwisata adalah perjalanan untuk rekreasi, liburan atau tujuan bisnis.

The World Tourism Organization (WTO) mendefinisikan wisatawan sebagai orang yang melakukan perjalanan dan tinggal di tempat-tempat diluar lingkungan yang biasa mereka tempati lebih dari 24 jam dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk liburan, bisnis dan tujuan lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan sebuah pekerjaan yang dibayar dari dalam tempat yang dikunjungi⁸.

Perkembangan pariwisata telah mendapat tempat yang sama dengan sector-sektor yang lain seperti sector ekonomi. Pariwisata juga memiliki spectrum tertentu guna memberikan klasifikasi yang jelas terkait dengan pariwisata tersebut. Demikianlah pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu Negara.

Pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk :

⁸ <http://unwto.org>, diakses tanggal 22 Juli 2016

a. Persatuan dan kesatuan bangsa

Pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu member andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

b. Pelestarian Budaya

Pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu memberi kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu Negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya Negara atau daerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai daerah.

c. Penghapusan Kemiskinan

Pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian

pariwisata akan mampu member andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

d. Peningkatan ekonomi dan Industri

Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk local dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan memberikan kesempatan kepada industry local untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut diatas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk local yang berkualitas⁹.

Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Melihat adanya kenyataan bahwa sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Mamuju Utara belum dimanfaatkan secara optimal, kesadaran untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk pariwisata mulai timbul. Bahkan hal ini menjadi paradig baru yang berkembang, pariwisata akan

⁹<http://sarwsfishingsea.blog.com/page/3/>. Diakses tanggal 22 Juli 2016

dapat mengatasi persoalan pembangunan Kabupaten Enrekang dan dapat mengkonservasi laju pemanfaatan sumber daya alam eksploratif.

Pola pengembangan pariwisata yang banyak diambil oleh para pengambil kebijakan, para pelaku pariwisata dan masyarakat sekitar pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community based Tourism Development). Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat ini secara langsung akan meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan. Dan secara tidak langsung akan menghambat laju kebocoran ekonomi luar daerah. Dengan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat akan menggerakkan ekonomi masyarakat daerah sekitar Kabupaten Mamuju Utara melalui sektor jasa, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Mamuju Utara.

Ada beberapa hal yang termuat dalam kegiatan pokok WTO (world Tourism Organization) yang dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pariwisata yang meliputi enam bidang¹⁰, yaitu :

a. Kerjasama di bidang Pengembangan Pariwisata

Memberi nasihat dan bantuan kepada pemerintah secara luas seperti menyusun nasihat dan bantuan master plan, studi kelayakan, kebutuhan tentang penanaman modal, transfer teknologi di bidang pemasaran, dan promosi.

¹⁰ op.cit, hal 19

b. Bidang pendidikan dan pelatihan

Merupakan wadah strategi bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan termasuk di dalamnya kursus “pelatihan untuk pelatih, kursus jangka pendek dan Kursus jangka panjang, dan pendirian pusat-pusat pendidikan dan pelatihan WTO”.

c. Bidang lingkungan dan perencanaan

WTO bergerak di bidang pengembangan kepariwisataan yang berkesinambungan yang juga memerhatikan aspek-aspek lingkungan. Dalam hal ini WTO turut berpartisipasi dalam forum-forum internasional yang berkaitan dengan lingkungan seperti pertemuan Puncak Tentang Bumi di Rio de Janeiro dan Seminar bumi di Kanada.

d. Bidang Kualitas Pelayanan Kepariwisata

Liberalisasi, kesehatan dan keamanan merupakan is penting di dalam peningkatan-peningkatan di bidang kepariwisataan. WTO berupaya mengurangi hambatan-hambatan yang timbul di dalam pengembangan pariwisata dan mendorong terciptanya liberalisasi usaha di bidang kepariwisataan.

e. Bidang Statistik dan penelitian Pasar

WTO menjadi pusat data dan analisis pariwisata yang memiliki koleksi lebih dari 180 negara. WTO secara berkesinambungan memonitor dan menganalisis kecenderungan-kecenderungan (trend) perkembangan kepariwisataan dunia. Untuk itu diterbitkan buku yang komprehensif dan dibagikan kepada anggota.

f. Bidang Komunikasi dan Demokrasi

Bidang ini adalah unit yang melaksanakan publikasi dan Pusat Informasi bagi pers dengan kegiatan WTO.

Dari beberapa program WTO diatas, maka dalam konsep pengembangan pariwisata di kabupaten mamuju Utara lebih mengarah kepada persoalan kerjasama di bidang pengembangan pariwisata, sebab program ini bertujuan mengangkat citra daerah sebagai sebagai tujuan investasi yang menarik dan menguntungkan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya investor untk melakukan investasi.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bersifat deskriptif dan prediktif untuk memberi gambaran secara jelas tentang proses pengembangan potensi pariwisata internasional, dalam hal ini juga peran pemerintah daerah, serta memprediksi pengembangan potensi pariwisata internasional di Kabupaten Mamuju Utara.

2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dari data primer dan data sekunder, dimana data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian, sedangkan data

sekunder adalah data yang dihasilkan data hasil penelusuran terhadap berbagai sumber literature dan sumber-sumber yang relevan.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif, dimana analisa diarahkan pada data non-matematis. Selain itu, sebagai pelengkap penulis sertakan pula data kuantitatif, jika data tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

F. Pengertian Pariwisata

Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Menurut Kodhyat (1998) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Sedangkan Gamal (2002), pariwisata didefinisikan sebagai bentuk. suatu proses kepergian sementara dari seorang, lebih menuju ketempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain. Selanjutnya Burkart dan Medlik (1987) menjelaskan pariwisata sebagai suatu transformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.

Menurut WTO (1999), yang dimaksud dengan pariwisata adalah

kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Sedangkan menurut Undang - Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.

G. Pariwisata Internasional

Pariwisata internasional pada tahun 2004 mencapai kondisi tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 763 juta orang dan menghasilkan pengeluaran sebesar US\$ 623 miliar. Kondisi tersebut meningkat 11% dari jumlah perjalanan tahun 2003 yang mencapai 690 juta orang dengan jumlah pengeluaran US\$ 524 miliar. Diperkirakan jumlah perjalanan wisata dunia ditahun 2010 akan mencapai 1 miliar orang dan di tahun 2020 akan menembus 1,5 miliar orang per tahun. Peningkatan jumlah perjalanan wisata internasional di tahun 2004 tampaknya akan terulang di tahun 2005, walaupun angka resmi dari UN-WTO belum dikeluarkan¹¹. Namun demikian perjalanan wisata di dunia masih dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan besar yang meliputi ancaman terorisme dan penyebaran penyakit mematikan (pandemi) yang melanda dunia akhir-akhir ini. *World Travel and Tourism Council* (WTTC) yang berkedudukan di London, Inggris, pada tahun 2003 telah menerbitkan suatu dokumen yang menggambarkan arah perubahan hubungan

¹¹ John naisbitt, 1994, *Global Paradox : Mega Trend 2000*, Binarupa Aksara, Jakarta, Hal.108

antara para pelaku kepariwisataan. Disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan saat ini memerlukan :

- a. Kemitraan yang koheren antara para pelaku kepariwisataan – masyarakat, usaha swasta dan pemerintah.
- b. Penyampaian produk wisata yang secara komersial menguntungkan, namun tetap memberikan jaminan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat.
- c. Berfokus pada manfaat bukan saja bagi wisatawan yang datang namun juga bagi masyarakat yang dikunjungi serta bagi lingkungan alam, sosial dan budaya setempat.

Pada sisi lainnya, kepariwisataan dunia juga menghadapi globalisasi yang antara lain berbentuk liberalisasi dan aliansi perdagangan jasa-jasa seperti tertuang dalam Persetujuan Umum Tarif Jasa (GATS) dan di tingkat regional diimplementasikan melalui pemberlakuan AFTA dan AFAS. Pemberlakuan liberalisasi perdagangan dan jasa ini adalah untuk menghilangkan hambatan dalam hal perdagangan, meliputi : transaksi perdagangan barang dan jasa, sumber daya modal (investasi), dan pergerakan manusia.

Dengan diberlakukannya AFAS, batas-batas negara yang selama ini menghambat pergerakan perdagangan baik barang dan jasa termasuk didalamnya pariwisata akibat aspek peraturan dan kebijakan yang berlaku dimasing-masing negara menjadi tidak berlaku lagi, sesuai dengan prinsip globalisasi yaitu borderless (dunia tanpa batas). Akibatnya persaingan/kompetisi antar bangsa adalah faktor kunci yang menuntut setiap

negara untuk menyiapkan strategi dan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi era perdagangan bebas, misalnya di bidang pariwisata melalui peningkatan kualitas dan pelayanan produk pariwisata, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Selanjutnya masalah keamanan global menjadi perhatian serius. Masalah keamanan sangat terkait dengan aksi terorisme yang pada faktanya telah menjadi salah satu ancaman serius pada saat ini. Masalah keamanan global ternyata telah menciptakan citra yang sangat kurang menguntungkan bagi industri pariwisata global dimana keselamatan wisatawan yang menjadi faktor utama telah terusik akibat aksi bom di destinasi maupun fasilitas pariwisata (hotel dan pesawat terbang) serta didorong dengan adanya pandangan bahwa saat ini tidak ada destinasi yang aman untuk berwisata. Apabila sentimen ini sudah masuk dalam benak wisatawan, maka hal ini akan menjadi permasalahan yang cukup serius bagi perkembangan pariwisata global di masa depan.

1. Kecenderungan Kepariwisata Di Asia Pasifik

Walaupun jumlah perjalanan wisata internasional di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2004 baru mewakili 20% perjalanan dunia atau setara dengan 152,5 juta perjalanan wisata, namun demikian pertumbuhan perjalanan wisata di kawasan ini merupakan yang tertinggi di dunia (27,9%) dibandingkan kawasan lainnya. Asia Pasifik sampai saat ini merupakan kawasan pariwisata dunia yang paling dinamis. Pada tahun 1990 jumlah perjalanan wisata di kawasan ini baru mencapai 57,7 juta

perjalanan namun dalam waktu limabelas tahun berlipat tiga menjadi lebih dari 150 juta perjalanan, walaupun sempat mengalami penurunan jumlah kunjungan yang signifikan di tahun 2003 (-9,0%). Pendapatan pariwisata di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2004 mencapai US\$ 124,97 miliar, meningkat 31,8% dibanding tahun 2003. Pada kawasan Asia Pasifik terdapat 4 (empat) sub kawasan pariwisata yaitu Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, Oseania dan Asia Selatan. Pada tahun 2004 keseluruhan kawasan ini rata-rata mengalami pertumbuhan di atas 12%, Hanya saja kawasan Asia Tenggara mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu lebih dari 30% diikuti Asia Timur Jauh (29,6%), Asia Selatan (16,7%) dan Oseania (12,5%) Di Asia Tenggara, seluruh negara yang melakukan kegiatan pariwisata melaporkan pertumbuhan dua digit di tahun 2004, walaupun diperkirakan kembali mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2005.

H. Pengembangan Dan Dampak Pengembangan Pariwisata

1. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru.

Menurut Hadinoto (1996), ada beberapa hal yang menentukan dalam pengembangan suatu obyek wisata, diantaranya adalah:

1. Atraksi Wisata

Atraksi merupakan daya tarik wisatawan untuk berlibur. Atraksi yang

diidentifikasi (sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata. Tanpa atraksi wisata, tidak ada peristiwa, bagian utama lain tidak akan diperlukan.

2. Promosi dan Pemasaran

Promosi merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi merupakan bagian penting.

a. Pasar Wisata (Masyarakat pengirim wisata)

Pasar wisata merupakan bagian yang penting. Walaupun untuk perencanaan belum/ tidak diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun informasi mengenai trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi, dan sebagainya dari wisatawan perlu dikumpulkan dari mereka yang berlibur.

b. Transportasi

Pendapat dan keinginan wisatawan adalah berbeda dengan pendapat penyuplai transportasi. Transportasi mempunyai dampak besar terhadap volume dan lokasi pengembangan pariwisata.

c. Masyarakat Penerima Wisatawan yang Menyediakan Akomodasi dan Pelayanan Jasa Pendukung Wisata (fasilitas dan pelayanan).

Menurut Suwanto (1997), unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata meliputi :

a) Obyek dan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada :

- i. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- ii. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- iii. Adanya spesifikasi/ ciri khusus yang bersifat langka.
- iv. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan;
- v. Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan dan lain- lain).
- vi. Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

b) Prasarana wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya.

c) Sarana wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang

diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

2. Dampak Pengembangan Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga memberikan berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya baik secara ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebutlah yang mengakibatkan dampak akan sebuah pariwisata menjadi studi yang paling sering mendapatkan perhatian masyarakat karena sifat pariwisata yang dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Pariwisata tentu saja akan memberikan dampak baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Pengembangan pariwisata dan kunjungan wisatawan yang meningkat dapat menimbulkan dampak atau pengaruh positif maupun negatif dan yang terkena dampak tersebut adalah masyarakat, lingkungan, ekonomi, serta sosial (Lenner dalam Mathieson & Wall, 1982).

Masyarakat dalam lingkungan suatu obyek wisata sangatlah penting dalam kehidupan suatu obyek wisata karena mereka memiliki kultur yang

dapat menjadi daya tarik wisata, dukungan masyarakat terhadap tempat wisata berupa sarana kebutuhan pokok untuk tempat obyek wisata, tenaga kerja yang memadai dimana pihak pengelola obyek wisata memerlukannya untuk menunjang keberlangsungan hidup obyek wisata dan memuaskan masyarakat yang memerlukan pekerjaan dimana membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Menurut Kusudianto (1996), bahwa suatu tempat wisata yang direncanakan dengan baik, tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi yang memperbaiki taraf, kualitas dan pola hidup komunitas setempat, tetapi juga peningkatan dan pemeliharaan lingkungan yang lebih baik.

Bila dilakukan dengan benar dan tepat maka pariwisata dapat memaksimalkan keuntungan dan dapat meminimalkan permasalahan. Penduduk setempat mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan obyek wisata, karena penduduk setempat mau tidak mau terlibat langsung dalam aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan kepariwisataan di daerah tersebut. Akan tetapi apabila suatu obyek wisata tidak dikembangkan atau ditangani dengan baik atau tidak direncanakan dengan matang, dapat menyebabkan kerusakan baik secara lingkungan maupun dampak-dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial.

I. Kepariwisataan Nasional Di Era Otonomi Daerah

Pada masa lalu pembangunan ekonomi lebih diorientasikan pada kawasan Indonesia bagian barat. Hal ini terlihat lebih berkembangnya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan barat Indonesia,

dibandingkan dengan yang terdapat di kawasan timur Indonesia. Hal ini juga terlihat dari pembangunan di sektor pariwisata, dimana kawasan Jawa-Bali menjadi kawasan konsentrasi utama pembangunan kepariwisataan. Sementara dilihat dari kecenderungan perubahan pasar global, yang lebih mengutamakan sumber daya alami sebagai destinasi wisata, maka potensi sumber daya alam di kawasan timur Indonesia lebih besar di bandingkan kawasan barat. Kualitas sumber daya alam yang dapat dijadikan daya tarik wisata unggulan di kawasan timur Indonesia, jauh lebih baik dan memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai amanat Undang-Undang pemerintah diharapkan mampu memberikan identifikasi potensi sumber daya alam untk dikelola dengan menawarkan kepada investor dalam rangka kerjasama dalam mengelola sumber daya alam¹². Namun demikian tidak secara otomatis kawasan timur Indonesia dapat dikembangkan menjadi kawasan unggulan, karena adanya beberapa masalah mendasar, seperti kelemahan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sebagainya.

Beberapa dampak yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan pembangunan di sektor pariwisata adalah:

¹² Muhammadiyah H.Adam, 2007. *Investasi asing diprovinsi Sulawesi Selatan dalam era Otonomi; Sebuah tinjauan hubungan internasional*, fisisip univ. 45 Makassar. Hal.20

- a. Pembangunan pariwisata yang tidak merata, khususnya di kawasan timur Indonesia, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia timur dari sektor pariwisata masih rendah.
- b. Indonesia hanya bertumpu pada satu pintu gerbang utama, yaitu Bali.
- c. Lemahnya perencanaan pariwisata di kawasan timur Indonesia dan kurang termanfaatkannya potensi pariwisata di kawasan tersebut secara optimal.
- d. Rendahnya fasilitas penunjang pariwisata yang terbangun.
- e. Terbatasnya sarana transportasi, termasuk hubungan jalur transportasi yang terbatas.

Dampak yang ditimbulkan dari akibat ketidakseimbangan pembangunan tersebut di atas, sangat terasa pada saat Indonesia mengalami berbagai tragedi kemanusiaan di Bali dan Jawa tahun 2002 - 2005. Tragedi ini memberikan pelajaran yang sangat mahal bagi Indonesia, dimana pendekatan pembangunan pariwisata yang berorientasi pada pasar mancanegara saja, menjadi tidak mampu menopang kepariwisataan Indonesia. Kedua, pembangunan pariwisata yang bertumpu dan berfokus hanya pada satu pintu gerbang utama membuktikan banyak kelemahan. Ketiga, perlunya diversifikasi aktivitas masyarakat pada satu destinasi pariwisata, sehingga dapat menjadikan alternatif pendapatan. Ketidakseimbangan pembangunan juga berdampak langsung pada ketidakseimbangan investasi yang ada. Investasi pariwisata di kawasan timur Indonesia, terlihat menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan kawasan barat, karena sarana penunjang bisnis

pariwisata skala nasional dan internasional telah tersedia, seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara dan lain sebagainya. Para investor lebih memilih kawasan-kawasan yang telah memiliki sarana penunjang, terutama sarana yang mampu menarik pasar untuk berkunjung. Selain pembangunan fasilitas yang tidak seimbang, lemahnya investasi pariwisata di daerah, juga akibat dari lemahnya kebijakan pemerintah daerah di bidang pariwisata. Tidak dapat dipungkiri pula rentannya keamanan di daerah-daerah timur Indonesia, seperti Kabupaten Poso, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, juga memberikan dampak pada rendahnya investasi pariwisata di kawasan Timur. Ketidakseimbangan pembangunan yang berdampak pada tidak meratanya pembangunan sektor pariwisata di Indonesia, harus dibenahi melalui penciptaan program-program pemerintah yang mendorong dan memfasilitasi terciptanya produk dan usaha pariwisata lebih besar di kawasan Indonesia timur. Selain itu, belajar dari pengalaman yang diambil dari pembangunan pariwisata yang bertumpu pada satu pintu gerbang, maka sebaiknya pemerintah pusat dan daerah harus mampu mendorong dan mendukung program jangka panjang berupa pengembangan pintu gerbang utama lainnya bagi pariwisata Indonesia.

Daerah ini harus strategis baik dilihat dari segi ekonomi, sosial dan politik serta keamanan pengunjung. Isu strategis pertama dalam masa penerapan otonomi daerah di sektor pariwisata adalah timbulnya persaingan antar daerah, persaingan pariwisata yang bukan mengarah pada peningkatan komplementaritas dan pengkayaan alternatif berwisata. Hal ini disebabkan

oleh beberapa faktor seperti: a. lemahnya pemahaman tentang pariwisata b. lemahnya kebijakan pariwisata daerah c. tidak adanya pedoman dari pemerintah pusat maupun provinsi. Akibatnya pengembangan pariwisata daerah sejak masa otonomi lebih dilihat secara parsial. Artinya banyak daerah mengembangkan pariwisatanya tanpa melihat, menghubungkan dan bahkan menggabungkan dengan pengembangan daerah tetangganya maupun propinsi/kabupaten/kota terdekat. Bahkan cenderung meningkatkan persaingan antar wilayah, yang pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Padahal pengembangan pariwisata seharusnya lintas Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota, bahkan tidak lagi mengenal batas karena kemajuan teknologi informasi. Isu kedua terkait dengan kondisi pengembangan pariwisata Indonesia yang masih bertumpu pada daerah tujuan wisata utama tertentu saja, walaupun daerah-daerah lain diyakini memiliki keragaman potensi kepariwisataan. Hal yang mengemuka dari pemusatan kegiatan pariwisata ini adalah dengan telah terlampauinya daya dukung pengembangan pariwisata di berbagai lokasi, sementara lokasi lainnya tidak berkembang sebagaimana mestinya. Selain itu kekhasan dan keunikan atraksi dan aktivitas wisata yang ditawarkan masih belum menjadi suatu daya tarik bagi kedatangan wisatawan mancanegara, karena produk yang ditawarkan tidak dikemas dengan baik dan menarik seperti yang dilakukan oleh negara-negara pesaing. Salah satu kelemahan produk wisata Indonesia, yang menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara tetangga adalah kurangnya diversifikasi produk dan kualitas

pelayanan wisata Indonesia. Para pelaku kepariwisataan Indonesia kurang memberikan perhatian yang cukup untuk mengembangkan produk-produk baru yang lebih kompetitif dan sesuai dengan selera pasar. Isu ketiga berhubungan dengan situasi dan kondisi daerah yang berbeda baik dari potensi wisata alam, ekonomi, adat budaya, mata pencaharian, kependudukan dan lain sebagainya yang menuntut pola pengembangan yang berbeda pula, baik dari segi cara atau metode, prioritas, maupun penyiapannya. Proses penentuan pola pengembangan ini membutuhkan peran aktif dari semua pihak, agar sifatnya integratif, komprehensif dan sinergis. Isu keempat dapat dilihat dari banyaknya daerah tujuan wisata yang sangat potensial di Indonesia apabila dilihat dari sisi daya tarik alam dan budaya yang dimilikinya. Namun sayangnya belum bisa dijual atau mampu bersaing dengan daerah-daerah tujuan wisata baik di kawasan regional maupun internasional. Hal tersebut semata-mata karena daya tarik yang tersedia belum dikemas secara profesional, rendahnya mutu pelayanan yang diberikan, interpretasi budaya atau alam yang belum memadai, atau karena belum dibangunnya citra (*image*) yang membuat wisatawan tertarik untuk datang mengunjungi dan lain sebagainya. Memperbanyak variasi produk baru berbasis sumber daya alam, dengan prinsip pelestarian lingkungan dan partisipasi masyarakat, merupakan strategi yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan daerah dan persaingan di tingkat regional. Selain kualitas kemasan dan pelayanan, produk pariwisata berbasis alam harus memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan. Selanjutnya,

pengemasan produk wisata dan pemasarannya, haruslah memanfaatkan teknologi terkini. Produk-produk wisata yang ditawarkan harus sudah berbasis teknologi informasi, sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan sekaligus meningkatkan kemampuan menembus pasar internasional.

Di luar seluruh permasalahan, tantangan dan hambatan yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan kepariwisataan, potensi yang dimiliki sebagai penunjang pembangunan kepariwisataan sangat tinggi. Kekayaan alam dengan keanekaragaman jenis atraksi wisata alam kelas dunia masih kita miliki. Atraksi wisata alam berbasis kekayaan alam tersebut meliputi daya tarik ekowisata, bahari, pulau-pulau kecil serta danau dan gunung tersebar di seluruh wilayah dan siap untuk dikembangkan. Kekayaan budaya yang tinggi dan beranekaragam juga menjadi potensi yang sangat tinggi untuk dilestarikan melalui pembangunan kepariwisataan. Pada dasarnya minat utama wisatawan datang ke suatu destinasi pariwisata lebih disebabkan karena daya tarik wisata budaya dengan kekayaan seperti adat istiadat, peninggalan sejarah dan purbakala, kesenian, monumen, upacara-upacara dan peristiwa budaya lainnya. Kemajemukan bangsa Indonesia dengan agama yang beragam menjadi potensi yang sangat besar dalam peningkatan kepariwisataan. Hampir tidak ada negara atau daerah di dunia yang memiliki penduduk yang heterogen dalam kepercayaan mereka. Sementara Indonesia sangat berbeda dan dari satu daerah ke daerah lainnya pengembangan pariwisata religius merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di masa datang.

Disamping kondisi tersebut di atas, masih ditemui dilema (*paradox*) dalam pengembangan industri pariwisata di Indonesia. Sifat paling mendasar dari investasi pada industri pariwisata adalah "*High Investment, Not Quick Yield*" artinya investasi di bidang pariwisata membutuhkan investasi yang besar dengan tingkat pengembalian yang lama (jangka panjang). Kondisi ini sungguh tidak menarik bagi kebanyakan *stakeholders* kepariwisataan yang masih memiliki budaya "*Instant and Shortcut*" dimana mereka lebih menyukai melakukan investasi yang dapat segera memberikan keuntungan. Sehingga para investor tidak tertarik menanamkan modalnya dalam mengembangkan usaha pariwisata. Dalam konteks ini diperlukan integrasi usaha pariwisata (*tourism business integration*) yang merupakan sinergi pelaku kepariwisataan secara horisontal maupun vertikal dan memberikan keuntungan atau manfaat bagi masing-masing pihak. Oleh karenanya diperlukan bentuk-bentuk insentif yang mampu merangsang timbulnya investasi di bidang kepariwisataan dengan menggunakan manajemen partisipatoris dengan melibatkan seluruh *stakeholders* baik masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan, pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten maupun Kota), serta pemerintah pusat. Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Nasional tahun 2005 – 2009, maka kebijakan dalam pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan untuk :

- a. meningkatkan daya saing destinasi, produk dan usaha pariwisata nasional;

- b. peningkatan pangsa pasar pariwisata melalui pemasaran terpadu di dalam maupun di luar negeri;
- c. peningkatan kualitas, pelayanan dan informasi wisata;
- d. pengembangan *incentive system* usaha dan investasi di bidang pariwisata;
- e. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata;
- f. Pengembangan SDM (standarisasi, akreditasi dan sertifikasi kompetensi)
- g. Sinergi *multi-stakeholders* dalam desain program kepariwisataan

Untuk menanggulangi berbagai permasalahan dan potensi yang telah disebutkan di atas dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan kepariwisataan yang telah disebutkan, perlu dilakukan serangkaian tindakan yang berbasis pada strategi :

- i. kebijakan fiskal (*Fiscal Policy*) dengan jalan memberikan berbagai kebijakan fiskal bagi pengembangan kepariwisataan di berbagai daerah khususnya di kawasan timur Indonesia, seperti *tax holiday*, pendukung permodalan, bunga pinjaman yang kompetitif dan sebagainya.
- ii. kebijakan Investasi (*Investment Policy*) melalui penerapan peraturan perundangan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah yang kondusif terhadap pembangunan usaha pariwisata baru maupun pengembangan usaha yang telah ada.
- iii. Pengembangan Infrastruktur dengan memperbesar aksesibilitas menuju dan dalam destinasi pariwisata melalui pembangunan serta perluasan jaringan

jalan, bandara, pelabuhan laut, jaringan telekomunikasi, penyediaan listrik dan air bersih. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan daya saing serta daya tarik dalam penyediaan fasilitas kepariwisataan di suatu daerah tertentu.

- iv. Pengembangan SDM melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat lokal guna mengembangkan kompetensi masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa kepariwisataan serta pelayanan bagi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara.
- v. Koordinasi Lintas Sektor mengembangkan kemitraan antara seluruh *stakeholders* pembangunan kepariwisataan melalui upaya koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat, asosiasi/usaha pariwisata, DPR/DPRD, maupun pemerintah.\

Seluruh kondisi tersebut di atas memerlukan pendekatan yang ditujukan untuk meningkatkan keunggulan daya saing (*competitive advantage*) yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan kepariwisataan. Michael E. Porter (2004) menyebutkan bahwa *competitive advantage* membutuhkan faktor-faktor pembangun seperti :

a. *Cost Advantages*

Keunggulan atas biaya yang harus dikeluarkan dalam penyediaan produk dan pelayanan wisata merupakan faktor penting dalam membangun keunggulan kompetitif destinasi pariwisata. Di dalamnya bergabung berbagai faktor yang mampu mengembangkan kinerja destinasi seperti perencanaan (desain); pengembangan produk wisata; pemasaran;

pelayanan; serta harga. Dalam konteks pemerintahan, keunggulan biaya dapat pula dibantu dengan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan insentif keuangan, penetapan tarif serta skema perpajakan atau retribusi.

b. Differentiation

Membedakan destinasi dan produk pariwisata merupakan fokus dalam mengembangkan keunggulan komparatif kepariwisataan. Suatu destinasi pariwisata harus mampu menjadi berbeda dengan pesaingnya ketika menghasilkan aksesibilitas, atraksi dan amenities yang unik dan berharga bagi wisatawan yang datang. Diferensiasi tidak melulu dilakukan dengan hanya menawarkan harga produk dan pelayanan yang lebih rendah.

c. Business Linkages

Mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan merupakan suatu proses integratif dalam membangun keunggulan kompetitif kepariwisataan. Hubungan yang dibangun bersifat vertikal dan horisontal serta saling terintegrasi satu sama lainnya.

d. Services

Pelayanan yang konsisten semenjak wisatawan tiba di pintu masuk (*entry point*), pada saat berada di destinasi pariwisata sampai dengan kepulangannya. Seluruh pihak yang terkait seperti administrasi bandara dan pelabuhan, petugas imigrasi, bea cukai dan karantina, supir taksi dan lainnya seyogyanya mampu memberikan pelayanan prima dan baku sehingga meninggalkan kesan yang dalam bagi wisatawan.

e. Infrastructures

Kondisi prasarana dan sarana pendukung kepariwisataan yang terpelihara dan beroperasi dengan baik juga merupakan faktor penting pembangun keunggulan kompetitif suatu destinasi pariwisata.

f. Technology

Penggunaan teknologi yang tepat dan mudah digunakan akan mampu memberikan dukungan bagi pelayanan kepada wisatawan yang datang selain mampu juga mendukung proses pengambilan keputusan dalam pengembangan, pengelolaan dan pemasaran destinasi pariwisata.

g. Human Resources

Kompetensi sumberdaya manusia pelayanan dan pembinaan kepariwisataan menjadi kunci penting pelaksanaan berbagai faktor pembentuk keunggulan kompetitif tersebut di atas. Berbagai faktor pembentuk keunggulan kompetitif tersebut menggambarkan kompleksitas pengembangan kepariwisataan yang bersifat multisektor dan multidisipliner bagi di tingkat pusat, provinsi maupun lokal.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju Utara

1. Profil Umum

Kabupaten Mamuju Utara dengan ibukota Pasangkayu termasuk kabupaten termuda dan terletak di bagian Utara Sulawesi Selatan, Kabupaten Mamuju Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju terletak 719 kilometer dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan dari Palu ibukota Sulawesi Tengah dengan jarak 130 Km, waktu tempuh sekitar 3 jam. Dengan waktu tempuh yang lebih dekat itu membuat sebagian masyarakat apabila ingin ibukota propinsi memilih ke Palu terlebih dahulu kemudian naik pesawat ke Makassar. Luas wilayah Kabupaten Mamuju Utara 3.043,75 Km².

Secara geografis Kabupaten Mamuju Utara terletak pada posisi 0⁰ 40' 10" - 1⁰ 50' 12" Lintang Selatan dan 119⁰ 25' 26" - 119⁰ 50' 20" Bujur Timur dari Jakarta (0⁰ 0' 0" Jakarta = 160⁰ 48' 28" Bujur Timur *Green Wich*) dengan luas wilayah sebesar 3.043,75 KM². Batas wilayah Kabupaten Mamuju Utara secara administratif dan diuraikan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Kab. Doggala, Prov.Sul-Teng
- Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Kab. Mamuju, Prov. Sul-Bar
- Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Kab. Luwu Utara , Prov.Sul-Sel

- Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Selat Makassar

Kabupaten Mamuju Utara merupakan salah satu Kabupaten dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat, yang berada pada ujung paling utara Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju Utara merupakan gabungan dari kecamatan Pasangkayu bersama kecamatan Sarudu, Baras, dan Bambalamotu yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju sebelum dimekarkan pada tahun 2001.

Kabupaten Mamuju Utara secara administrasi pemerintahan terdiri atas 12 kecamatan dan 59 Desa dan 4 Kelurahan. Kecamatan Dapurang merupakan kecamatan terluas dengan luas 930,06 Km² atau 30,56% persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mamuju Utara, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sarjo dengan luas 36,49 Km² atau 1,20% persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mamuju Utara¹³.

Berdasarkan letak geografis kecamatan yang paling jauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Duripoku, dimana ibukota Kecamatan Duripoku (Tammarunang), mempunyai jarak sekitar 101 Km dari ibukota kabupaten (Pasangkayu). Sedangkan kecamatan yang terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Pedongga yang berjarak sekitar 15 Km dari ibukota kabupaten.

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mamuju_Utara

Tabel 2.1
 Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan
 dan Jumlah Kelurahan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(Km ²)	(%) Total
1	Sarudu	5	97.05	03.19 %
2	Dapurang	5	930.06	30.56 %
3	Duripoku	4	217.25	07.14 %
4	Baras	6	275.12	09.04 %
5	Bulu Taba	7	432.65	14.21 %
6	Lariang	7	81.65	02.68 %
7	Pasangkayu	6	310.91	10.21 %
8	Tikke Raya	5	262.61	08.63 %
9	Pedongga	4	92.09	03.03 %
10	Bambalamotu	6	243.65	08.00 %
11	Bamabaira	4	64.22	02.11 %
12	Sarjo	4	36.49	01.20 %
T o t a l		63	3.043.75	100 %

Sumber: BPS 2011

Kondisi kawasan Kabupaten Mamuju Utara meliputi kawasan terpencil, pedalaman, pegunungan, dan kawasan pesisir. Kondisi curah hujan juga bervariasi sepanjang tahun 2009 dengan total curah hujan sebanyak 2.201 mm³ dan berkisar antara 20 mm³ hingga 367 mm³. Curah hujan sebanyak 20 mm³ terjadi pada bulan Juni, sedangkan sebanyak 703

mm³ terjadi pada bulan Nopember. Total hari hujan pada tahun 2009 berkisar antara 6 hari hingga 17 hari tiap bulannya.

2. Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang merupakan salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian Pemerintah. Hal ini terjadi karena berbagai permasalahan yang timbul di daerah yang menuntut penyelesaian dari segi tata ruang. Selain itu, semakin disadari bahwa pembangunan yang terarah dan terencana lokasinya akan memberikan hasil yang lebih optimal secara regional. Untuk itu berbagai usaha yang telah dilakukan Pemerintah untuk menata ruang secara lebih intensif. Penataan ruang dilakukan pada berbagai tingkatan wilayah dan kota yang mencakup aspek Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang saling berkaitan.

Mengacu kepada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, bahwa setiap daerah Kabupaten harus menyusun rencana tata ruang wilayah Kabupaten sebagai arahan pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah yang menitikberatkan kepada kewenangan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten, termasuk Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten.

Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten merupakan upaya merumuskan usaha pemanfaatan ruang secara optimal dan efisien serta lestari bagi kegiatan usaha manusia di wilayahnya yang berupa pembangunan sektoral, daerah, swasta dalam rangka mewujudkan tingkat

kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai dalam kurung waktu tertentu dengan mengedepankan pada keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara kawasan wilayah Kabupaten serta keserasian pembangunan antara sektor.

Rencana tata ruang wilayah adalah merupakan payunghukum yang bersifat fleksibel artinya bahwa rencana pemanfaatan ruang harus mampu mengakomodasi tuntutan perkembangan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan stakeholder yang terkait, sehingga ketidakberdayaan tata ruang sebagai dampak dari faktor eksternal dan internal maka diperlukan pemutakhiran rencana melalui revisi rencana tata ruang.

3. Penduduk, Rumah Tangga Dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga

Distribusi penduduk Kabupaten Mamuju Utara dapat dikatakan tersebar secara merata untuk masing-masing kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Pasangkayu dengan 22.886 jiwa (17.03%), sedangkan Kecamatan Duripoku merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 4.875 jiwa (3.63%). Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Mamuju Utara pada Tahun 2011 adalah 44,15 jiwa/km². Kepadatan penduduk paling tinggi adalah di Kecamatan Sarjo dengan tingkat kepadatan sebesar 188,63 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Dapurang memiliki tingkat kepadatan terendah dengan 12,40 jiwa/km².

Tabel 2.3
Luas daerah, Kepadatan, Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga
Menurut Kecamatan/ Kelurahan di Kabupaten
Mamuju Utara Tahun 2011

No	Kecamatan	Penduduk	Rumah Tangga	Rata-Rata Rumah Tangga
1	Sarudu	12.168	2.818	4
2	Dapurang	11.530	2.716	4
3	Duripoku	5.875	1.185	4
4	Baras	15.356	3.682	4
5	Bulu Taba	9.396	2.261	4
6	Lariang	5.993	1.418	4
7	Pasangkayu	22.886	5.589	4
8	Tikke Raya	13.805	3.505	4
9	Pedongga	6.563	1.711	4
10	Bambalamotu	16.292	3.492	5
11	Bambaira	8.622	2.874	5
12	Sarjo	6.883	1.429	5
	Mamuju Utara	134.369	31,680,00	4

Sumber : BPS Mamuju Utara Dalam Angka 2011

B. Kondisi Pariwisata Kabupaten Mamuju Utara

Sebagai bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Mamuju Utara mwingcupada pembangunan kepariwisataan nasional yang tetap menjunjung embe khas bangsa Indobesia, seperti yang tertuang daam pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, kepariwisataan Ke\abupaten Mamuju utara merujuk pada norma-norma agama dan nilai-niai budaya dalam setiap segi kehidpan. Falsafah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Mamuju Utara menyangkut hubungan kehidupan yang berkesinambungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Segala bentuk kegiatan kepariwisataan

sejalan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spritual, moral. Dan etika.

Nilai-nilai budaya tradisional yang tumbug dan berkembang di Kab.Mamuju Utara yang berlaku secara universal adalah sebagai berikut :

- a. Etika dan moral : nilai ini mengisyaratkan bahwa dalam melakukan interaksi dan kerjasama antar semua pihak ataupun dalam melakukan aktifitas pemanfaatan sumber daya, senantiasa mengedepankan nilai etika dan norma.
- b. Budaya Sipakatau : mengisyaratkan bahwa dalam menjalin hubungan kerjasama antar kelompok masyarakat dan antar daerah senantiasa mengedepankan saling menghormati, saling menghargai dan ember eksistensi dan jatidiri masing-masing kelompok daerah.
- c. Kebinekaan : nilai ini bermaksud bagaimana kita bisa menghargai keragaman sebagai kekayaan sosial budaya yang akan menjaminkesinambungan pembangunan.

2. Potensi Pariwisata di Kabupaten Mamuju Utara

Kabupaten Mamuju Utara memiliki potensi pariwisata yang begitu beragam, khususnya dari sisi produk wisata denga potensi alam dan budaya yang dimiliki, Kabupaten Mamuju Utara menawarkan berbagai daya tarik wisata.

Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan azaz manfaat, kekeluargaan, adil dan merata,

keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan busaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Potensi wisata kabupaten Mamuju Utara beraneka ragam antara lain :

a. Pantai sarjo

Objek wisata Pantai Sarjo yang berjarak hanya \pm 3 km dari kota kecamatan, sudah dikenal sebagai tempat rekreasi pantai yang dikunjungi oleh penduduk setempat. Rute perjalanan pantai, dicapai melalui pemukiman penduduk yang umumnya dihuni masyarakat mandar dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Itulah sebabnya dipantai sarjo, perahu-perahu sandeq maupun lepa-lepa, ditambatkan di pinggir-pinggir pantai, sementara pemiliknya beristirahat di rumah masing-masing.

Jalan menuju pantai relatif baik berupa jalan pengerasan yang btidak begitu lebar sepanjang \pm 400 meter dari jalan poros Trans Sulawesi. Sebelum tiba dipantai hamparan tambak milik penduduk cukup luas menghasilkan ikan bandeng sehingga pantai sarjo mamiliki nilai tambah jika digarap sebagai objek wisata secara profesional. Di kawasan pantai dapat di bangun pondok wisata dengan warung-warung yang menu utamanya berasal dari laut maupun dari tambak.

Ruang hijau antara bibir pantai dengan tambak,ditumbuhi banyak pohon kalapa, membuat suasana pantai cukup sejuk, sehingga menambah

daya tarik pantai sarjo yang berpasir bersih dengan hamparan laut biru yang luas.

Di pantai sarjo ini pula biasa diadakan lomba sandeq maupun lepa-lepa yang diprakarsai oleh Pemda Kabupaten Mamuju Utara. Jika aktivitas lomba sandeq dan lepa-lepa ini dapat dilakukan secara teratur pada bulan-bulan tertentu, kegiatan ini dapat menjadi event pariwisata yang dapat dijadwalkan dalam kalender pariwisata.

b. Pantai Cinoki

Terletak dipesisir pantai selat Makassar, Pantai Cinoki Sarudu memiliki daya Tarik tersendiri, Potensial digunakan sebagai objek berwisata. Salah satu objek wisata unggulan Di Kabupaten Mamuju Utara ini memiliki pantai yang eksotik, hamparan pasir putih dan rimbunan pohon kelapa yang membentang di sepanjang pantai menambah elok keindahan di pantai cinoki.

Berjarak + 500 m dari jalan Poros Trans Sulawesi, 2 km dari kota kecamatan dan + dan 75 km dari ibukota Kabupaten, dengan akses jalan yang beraspal sangat mudah di jangkau dengan kendaraan mobil dan motor. Pantai Cinoki memiliki keunikan tersendiri, Karena di sekitar areal objek wisata terdapat kuburan tua yang konon berusia ribuan tahun.

Pantai Cinoki merupakan jenis pantai sekunder atau pantai erosi. Gelombang yang terbentuk oleh kerja gelombang, pantai ini dapat memiliki garis pantai yang lurus atau beraturan tergantung pada komposisi dan struktur batuan, jenis pantai seperti ini sangat cocok dikembangkan

untuk jadi tempat tujuan wisata karena memiliki lebar panjang pantai yang sangat ideal.

Ruang terbuka hijau di kawasan pantai Cinoki, memungkinkan kawasan ini di kembangkan menjadi destinasi wisata pantai yang menarik di kabupaten Mamuju Utara ini menciptakan keteduhan dan kesejukan angin laut di kawasan pantai , memungkinkan pengunjung dapat menikmati keindahan dan suasana pantai yang damai.

Sebagai salah satu Destinasi unggulan Pariwisata di Kabupaten Mamuju Utara, Pantai Cinoki di Prioritaskan Menjadi tempat tujuan berwisata baik wisatawan local maupun wisatawan mancanegara ini di buktikan dengan pembangunan sejumlah sarana wisata antara lain, Pembangunan gazebo, jalan rabat beton, dan gerbang menuju tempat wisata.

c. Pantai Batu Oge

Terletak di Kecamatan Pedongga berjarak \pm 15 km dari kota Pasangkayu, Objek Wisata Pantai Batu Oge memiliki hamparan pasir yang cukup bersih pada saat air laut surut, lebar pantai dapat mencapai 100 meter, sementara panjang pantai mencapai ribuan meter. Hal ini menyebabkan pantai Batu Oge cukup baik digunakan untuk kegiatan wisata pantai seperti bersepeda pantai dan semacamnya.

Sementara pada bentang alam laut sangat baik untuk berlayar maupun memancing karena diperairan ini terdapat batu karang yang menjadi habitat ikan-ikan laut. Pantai Batu Oge dapat dicapai melalui jalan

pengerasan sepanjang \pm 2 km dari jalan poros trans Sulawesi, melalui perkampungan nelayan yang pada umumnya dihuni oleh orang-orang Kaili , selepas perkampungan nelayan tersebut hamparan pasir yang bersih dan laut biru sudah terlihat diantara pohon-pohon kelapa yang berjajar disepanjang pantai.

Hijauan hutan-hutan perdu dan tegakan pohon yang rindang membuat desiran angin terasa begitu sejuk, perasaan pun terasa damai ketika kita mencoba melepas lelah dibawah pohon-pohon rindang sambil menikmati bentang alam laut yang biru. Pohon-pohon rindang disepanjang pantai yang menjadi pembatas antara bibir pantai dengan jalur hijau dan kebun-kebun penduduk setempat, member nilai tambah bagi daya tarik pantai Batu Oge. Apalagi ruang-ruang terbuka yang berbukit dan cukup luas dapat menjadi tempat-tempat untuk pondok wisata maupun tempat parkir serta tempat anak-anak bermain, bahkan ruang terbuka itu dapat menjadi tempat untuk perkemahan

Ruang terbuka hijau di kawasan Pantai Batu Oge memungkinkan kawasan ini dapat dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata pantai yang menarik di Kabupaten Mamuju Utara, ini disebabkan rimbunan flora pohon menciptakan keteduhan dan kesejukan angin laut di kawasan pantai memungkinkan pengunjung dapat menikmati keindahan dan suasana pantai yang damai. Pada Tahun 2012, Objek wisata Pantai Batu Oge mengalami banyak perubahan di bidang pengembangan sarana kepariwisataan antara lain didirikannya beberapa gazebo disekitar areal

wisata. Hal ini dilakukan karena objek Wisata Pantai Batu Oge merupakan Destinasi unggulan pariwisata di Kabupaten Mamuju Utara.

d. Goa Lawa

Goa Lawa adalah salah satu tempat wisata yang berada di kabupaten mamuju utara, Kecamatan pasangkayu, Kelurahan martajaya Desa Bangun Sari. Gua ini pertama kali ditemukan oleh orang hindu yang berprofesi sebagai petani, petani tersebut memiliki kebun di sekitar gowa lawa. Gua ini dinamakan sebagai GUA LAWA karena dalam bahasa bali lawa berarti kelelawar.

Di dalam gua anda akan disajikan pemandangan yang sangat indah, seperti batu-batuan yang mengkristal, batu-batuan yang lembab, langit-langit gua yang penuh dengan kelelawar yang bergantung, serta tebing yang berapit dengan pancaran cahaya yang sangat indah dan sejuk.

Ada 3 lubang gerbang dari gua lawa, namun ketiganya saling tembus. Serta ada satu lubang gua yang memisah dari gua induk tetapi ukurannya kecil. Ada beberapa pengunjung berpendapat bahwa gua lawa ini adalah bekas tempat hunian suku bunggu, yang di mana suku bunggu adalah suku asli dari mamuju utara, bahkan ada juga yang berpendapat bahwa gua ini bekas dari kerajaan suku bunggu, dengan melihat isi dari gua lawa tersebut. Di dalam gua lawa terdapat sebuah batu yang indah dengan pancaran kristal-kristal kecil yang berbentuk seperti kursi kerajaan.

Akses untuk menuju gua lawa sangat mudah karena bisa di tempuh dengan menggunakan sepeda motor atau mobil. Jarak dan Waktu yang di

perlu hanya ± 12 km dan 15-20 menit dari kota Pasangkayu. Jika para wisatawan berangkat dari kota Pasangkayu melewati jalan poros Trans Sulawesi, pas berada di pos polisi Martajaya ada perempatan anda lurus saja sejajar dengan pasar Martajaya. Setelah itu anda akan melakukan perjalanan menuju gua tersebut melewati jalan poros Martajaya-PT. Pasangkayu dengan jarak ± 2 km dari pasar Martajaya. Lokasi tersebut dekat dengan SMKN 01 Pasangkayu, tetapi anda akan lebih dulu sampai ke lokasi gua tersebut sebelum SMKN 01 Pasangkayu. Dengan demikian anda akan melihat papan tulisan wisata alam Gua Lawa. Setelah sampai di tempat tersebut, jangan khawatir karena warga setempat telah membuat tempat parkir dan menuju lokasi gua tersebut anda dituntut untuk berjalan kaki sekitar ± 250 m. Menuju gua Lawa.

e. Goa Ape'

Tidak salah jika Objek Wisata Goa Ape' merupakan salah satu Objek Wisata unggulan di Kabupaten Mamuju Utara ini di buktikan dengan keindahan dalam Goa yang relatif luas dengan stalagtit dan stalagmit yang sangat mengagumkan, relief bergambar tampak pada dinding goa dan panorama disekitar goa membuat suasana nyaman dengan hembusan angin yang sejuk. Objek Wisata Goa Ape' terletak di desa bambaira berjarak sekitar $\pm 3,5$ km dari kecamatan Bambaira dan berjarak sekitar ± 45 km dari Ibukota Kabupaten Mamuju Utara.

Objek Wisata Goa Ape' termasuk salah satu objek wisata yang paling sering dikunjungi wisatawan lokal ini dikarenakan akses jalan menuju

objek wisata mudah dijangkau karena hanya berjarak \pm 1,5 km dari jalan poros Trans Sulawesi. Untuk menuju ke lokasi Objek wisata sangatlah mudah ini dikarekan akses ke goa berupa jalan yang sudah dikeraskan sehingga dapat dilalui berbagai jenis kendaraan baik mobil, motor.

Untuk wisatawan yang ingin mengunjungi Objek Wisata Goa Ape' terdapat rumah penduduk yang berjarak \pm 3 km dari lokasi dan sangat potensial untuk home stay, Hotel dan Penginapan di ibukota kabupaten dapat dijangkau \pm 1 jam perjalanan, dan sumber air bersih disekitar goa relatif baik¹⁴.

Pariwisata Gua Ape merupakan objek wisata ang akan menjadi focus penelitian pada skripsi ini. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai objek wisata Gua Ape, yaitu :

1. Sejarah Penemuan Gua

Gua Ape, secara geografis terletak pada BT 119,30,58, LS 0,29,09 dan wilayah administratifnya terletak di Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat. Mengenai penamaan gua, dengan sebutan gua Ape, ternyata menjadi hal yang simpang siur dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan, masyarakat Desa Bambaira yang mayoritas bersuku Bugis, tidak mengetahui secara pasti arti kata Ape tersebut. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Bapak Mahmud, salah satu tokoh

¹⁴. Direktorat Pengembangan Potensi Daerah BKPM (2013). *Wisata Alam Kabupaten Mamuju* Available at : <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/commodityarea.php?ia=7621&ic=2512>

masyarakat, sekaligus pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bambaira selama 3 periode, sejak 1993 s/d 2009, saat diwawancarai oleh Anggota Mapala Muhibbul Bi'ah, usai shalat Jum'at, di halaman Masjid Desa Bambaira, Jum'at 23 Mei 2014. Menurutnya, nama Gua Ape sudah menjadi sebutan yang telah lama hinggap ditelinga masyarakat. Beliau menambahkan, sejak ditemukannya gua tersebut, sekitaran tahun 1975 oleh Pak Azis, (sekarang telah menjadi ketua Adat Desa Bambaira), masyarakat setempat telah lama mendengar nama Gua Ape, meskipun belum menemukannya bahkan melihatnya secara langsung. Hingga kini, gua Ape, sering menjadi tempat kunjungan warga-warga lokal, maupun peneliti yang berasal dari mancanegara, karena pada tahun 1993, Gua Ape pernah dikunjungi oleh peneliti dari Swiss, dimana pak Mahmud sendirilah yang menjadi Tour Guide-nya.

Meskipun demikian, menurut kabar yang ditemukan oleh Anggota Mapala Muhibbul Bi'ah, saat melakukan interaksi pada beberapa warga, yang dijumpai pada saat perjalanan menuju lokasi gua, mendapatkan keterangan bahwa, gua Ape, diambil dari bahasa Kaili, yakni Na Ape yang artinya, kosong atau hampa. Pemaknaan kosong maupun hampa, karena dalam gua tersebut, kondisi dalamnya sangatlah kosong, dan tidak terdapat apa-apa (tidak terhitung dengan ornamen maupun biota dalam gua). Berdasarkan keterangan yang dilansir, dahulunya orang Kaili bermukim disekitaran gunung wilayah

Bambaira, dan berdekatan dengan lokasi gua, kemudian, untuk memastikan kata Na Ape, tim mencocokkannya dengan kata Na Ope, artinya rubuh atau jatuh. Sehingga dalam perbincangan tersebut, mendapatkan kejelasan bahwa, dengan kondisi gua, yang kosong dan hampa, terjadilah bagian gua yang rubuh, sehingga dalam analisa ilmu caving, rubuhan lorong gua itulah, menyebabkan terjadinya mulut gua yang vertikal.

Mengenai pembentukan gua Ape, tim sama sekali tidak mendapatkan keterangan. Karena masyarakat tidak mengetahui secara pasti, kapan gua Ape terbentuk. Hal ini memang telah dimaklumi, karena umur gua sesuai dengan proses pembentukannya, membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebab, berdasarkan ornamen dalam gua Ape, yang berukuran besar dan panjang, menunjukkan umur gua telah sangat tua. Diantara ornamen tersebut berupa Stalaktik yang tingginya berukuran 177 cm, lebar 70 cm, tinggi stalakmit berukuran 168 cm, lebar 170 cm, Bersambungnya stalaktik dan stalakmit menjadi sebuah tiang, dengan tinggi 3 meter, pertemuan keduanya dengan panjang 180 cm, serta beberapa ornamen lainnya yang tidak kalah unik, dapat disimak dalam penjelasan setelah ini.

Kemudian, tim menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi dengan Pak Azis, selaku ketua Adat, yang menemukan gua Ape tersebut. Menurutnya, pada tahun 1975, wilayah sekitaran gua dahulunya merupakan hutan belukar. Secara tanpa sengaja, Pak Azis

menemukan sebuah lobang horizontal, saat memaras semak-semak dan menebang pohon-pohon liar, untuk dibuka menjadi lahan perkebunan. mengetahui adanya lubang tersebut, Pak Azis menyempatkan waktu untuk masuk kedalamnya. Sejak saat itulah informasi mengenai keberadaan letak gua Ape, langsung tersiar sangat cepat ditelinga masyarakat.

2. Data Gua Hasil Eksplorasi

Sesuai data kronologis sebelumnya, pada tanggal 23 Mei 2014, pukul 16.00 WITA, Tim A langsung melakukan eksplorasi, dimulai pada mulut gua Ape dan menyempatkan waktu untuk mengukur mulut gua. Data yang dihasilkan, yakni lebar mulut gua 113 cm dan tinggi 114 cm. karena ukuran mulut gua yang lebih pendek dari ukuran tubuh manusia, mengharuskan tim masuk dari stasiun nol (mulut gua) dengan posisi tubuh menjongkok, ke stasiun 1 dalam jarak 465 cm, arah kompas 800, sudut miring (klinometer) -70, sehingga dilalui dengan medan yang menurun. Pada stasiun 1, kondisi atap gua setinggi ..?? sehingga dapat dilalui tim dengan berdiri normal. Kemudian, terdapat 3 lorong percabangan gua, dengan jarak dinding kiri 200 cm, dinding kanan 330 cm, serta banyak terdapat stalaktik dan stalakmit yang berukuran besar. Diantaranya Stalaktik yang tingginya berukuran 177 cm, lebar 70 cm, tinggi stalakmit berukuran 168 cm, lebar 170 cm. Adapun penentuan stasiun dalam eksplorasi ini, leader menentukannya berdasarkan perubahan bentuk

lorong dan temuan ornament yang dianggap unik. Kemudian, metode pemetaannya dengan sistem forward method, yakni tim mengambil data gua dengan cara tahap demi tahap, pada setiap stasiunnya.

Kemudian Tim A memilih lorong percabangan pertama, pada arah 10 menuju stasiun 2 dalam jarak 580 cm, sudut kemiringan 80, dinding kiri 140 cm, dinding kanan 270 cm, tinggi atap,? Dalam stasiun ini, terdapat tetesan air dari ujung-ujung stalaktik, serta ditemukan Jangkrik dan laba- laba Gua (mengenai penjelasan biota gua dan pembentukan ornamen, akan dibahas pada sub bab berikutnya).

Selanjutnya, Tim A melanjutkan ke stasiun 3, dengan arah kompas 00, sudut kemiringan 1,60, jarak 615 cm, dinding kiri 100 cm, kanan 80 cm, tinggi atap 2 m. kondisi lorong menuju stasiun ini, mulai menyempit, serta peralihan zona terang menuju zona senja, karena cahaya yang masuk dalam stasiun ini, hanya membutuhkan cahaya yang minim dari sinar matahari, yang masuk dari mulut gua.

C. Bentuk Kerja Sama

Dari beberapa program WTO disebutkan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa dalam konsep pengembangan pariwisata, Pemda Kabupaten Mamuju Utara lebih mengarah pada persoalan Kerjasama di Bidang Pengembangan Pariwisata, sebab program ini bertujuan mengangkat citra daerah sebagai tujuan investasi yang menarik dan menguntungkan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan investor untuk melakukan investasi.

Adapun beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan Pemda melalui Dinas Perhubungan Pariwisata Kabupaten Mamuju Utara adalah :

1. Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Pariwisata

- a. Pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan objek wisata
- b. Pelaksanaan pemberian fasilitas dan pemantauan penelenggaraan usaha dan hiburan umum
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kerja pariwisata

2. Bidang Pemasaran dan Promosi

- a. Pelayanan informasi budaya dan pariwisata
- b. Promosi dan penyuluhan dalam rangka pengembangan pariwisata
- c. Pelaksanaan pengembangan Objek wisata dan tempat-tempat rekreasi
- d. Pelaksanaan kunjungan wisata

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah dalam mengkordiansikan pembangunan, dalam hal ini Kabupaten Mamuju Utara sebagai kordinator pembangunan lintas wilayah dan lintas sector di Kabupaten. Kordinasi harus dilakukan di tingkat pemerintah, maupun antar pemerintah – pengusaha – akademisi – masyarakat umum yang terkait dengan pengembangan pariwisata. Penyeragaman bentuk operasional pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang bisa diadopsi diseluruh wilayah Kabupaten Mamuju Utara cenderung dinilai akan menguntungkan banyak pihak. Pengembangan dan pengelolaan pariwisata Kabupaten Mamuju Utara yang terkoordinir dengan baik dinilai akan menjadi lingkungan yang kondusif bagi iklim investasi pariwisata sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya yang Berkualitas

Subjek utama dalam pembangunan potensi pariwisata Internasional di Kabupaten Mamuju Utara adalah sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan, baik pengelolaan daya tarik wisata maupun fasilitas penunjang wisata, pariwisata Kabupaten mamuju Utara didukung oleh sumber daya manusia yang melayani wisatawan di seluruh daya tarik wisata yang dimiliki, dan sumber daya manusia yang

mencukupi dan berkualitas akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan karena pelayanan yang baik merupakan komponen pariwisata yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Mamuju Utara, disusul oleh fasilitas makan dan minum, dan yang ketiga adalah perusahaan objek wisata. Sumber daya manusia pada sector pariwisata di Kabupaten Mamuju Utara masih sangat kecil dan belum terdistribusi dengan baik pada berbagai jenis usaha pariwisata yang telah tersedia di Kabupaten Mamuju Utara. Selain jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas, dari sisi kualitas sumber daya manusia pada sector usaha pariwisata juga masih sangat rendah, baik dalam hal latar belakang pendidikan maupun pelatihan kepariwisataan yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut.

2. Sarana dan Prasarana Kepariwisataan

Motivasi yang mendorong orang untuk mengadakan perjalanan akan menimbulkan permintaan-permintaan yang sama mengenai prasarana dan sarana kepariwisataan seperti jaringan telekomunikasi, akomodasi dan sebagainya. Dalam hal ini kesiapan sarana dan prasarana kepariwisataan merupakan salah satu factor penentu berhasilnya pengembangan industry pariwisata daerah. Terlebih ketika program otonomi daerah diterapkan, maka masing-masing daerah di tuntut untuk lebih memberikan perhatiannya pada penyediaan sarana prasarana kepariwisataan yang memadai dan paling tidak sesuai dengan standar internasional.

Pengusaha obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan. Dengan demikian perlu adanya pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana di daerah-daerah tujuan wisata untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata.

Sarana prasarana merupakan unsur pokok dalam kegiatan industry pariwisata. Apabila pembenahan dan pengelolaan sarana prasarana kepariwisataan ditelantarkan akan berakibat pada tidak tercapainya dampak positif industry pariwisata dalam peningkatan PAD, penciptaan lapangan kerja dan sebagai pendorong pembangunan daerah.

Ketiga hal tersebut merupakan usaha serta peran pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dalam mewujudkan Mamuju Utara sebagai salah satu tujuan wisata yang berstandar Internasional. Dengan usaha serta peran yang dilakukan diharapkan dapat mendongkrak tingkat pendapatan saerta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamuju Utara.

B. Dampak Pengembangan Potensi Pariwisata Internasional

1. Dampak Sosial – Ekonomi

Harus diakui bahwa program pengembangan ekonomi nasional bertumbuh pada industry pariwisata kita. Bahkan, perkembangan pariwisata dalam tiga dasawarsa terakhir telah melewati batas – batas yang paling optimis dari perencanaannya sendiri. Hampir seperempat dari pendapatan dunia beredar di seputar industry pariwisata, dan tanda-tanda

selalu menunjukkan grafik yang terus menanjak. Pariwisata telah menjadi industry sipil terbesar yang melampaui asset industry kendaraan, baja, elektronika dan pertanian. Satu di antara lima belas orang di dunia kini bekerja di industry jasa ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketakutan bahwa pariwisata akan merusak kebudayaan tradisional sudah mulai surut. Apalagi kemakmuran yang baru diperoleh justru secara sadar dipergunakan untuk memperkuat perwujudan keagamaan, tradisi serta kesenian.

Seperti yang dikatakan Soemardjan dalam bukunya M.baiqun¹⁵ “tidak berlebihan apabila pariwisata dimasukkan ke dalam bidang ekonomi yang pembangunan ekonomi yang demikian itu, keberhasilan industry pariwisata selalu diukur dari target (angka) kedatangan wisatawan mancanegara karena kedatangan mereka dapat menambah kekayaan devisa Negara dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Ditinjau dari sudut ekonomi, maka pariwisata yang mendatangkan wisatawan mancanegara ini menempatkan pihak Indonesia menjadi penjual jasa wisata, sedangkan negara-negara yang menjadi sumber wisatawan berhadapan dengan Negara kita sebagai pembeli jasa – jasa itu. Dalam hubungan jual – beli itu dan mengingat saingan yang keras dengan negara – negara lain, maka untuk mendapatkan bisnis yang sukses, Indonesia harus mampu menyediakan jasa wisata yang bermutu

¹⁵ M Baiquni, I Putu Anom dkk, 2010. *Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pusaran Krisis Global*:Denpasar, Udayana University Press, Hal 26

tinggi dan berharga yang murah. Lagi pula, Indonesia harus terus menerus berusaha agar dikenal dengan luas di negara – negara asal wisata.

Untuk dapat mengusahakan mutu jasa dan agar dapat menarik sebanyak mungkin wisatawan mancanegara, maka masyarakat Indonesia sebagai penerima wisata perlu menyelami faktor-faktor ekonomi dan budaya yang mendorong orang-orang daerah (negara) sumber wisatawan agar ingin berwisata ke Indonesia, khususnya Kabupaten Mamuju Utara. Ungkapan menyelami faktor-faktor ekonomi inilah yang akan memunculkan sikap paradox. Kelanjutan dari ungkapan menyelami faktor-faktor ekonomi adalah keharusan memiliki dan menguasai manajemen itu pada umumnya tidak mungkin disediakan masyarakat setempat.

2. Dampak Pariwisata Terhadap Kebudayaan Lokal

Dampak langsung pariwisata terhadap kebudayaan, menurut Dean (1991), antara lain menyangkut atraksi pariwisata yang berlanjut pada perubahan aktivitas seni atau produksi budaya yang disesuaikan dengan selera wisatawan. Dasar pertimbangannya antara lain para wisatawan mancanegara ini merupakan komunitas tersendiri yang khas, karena itu perlu disuguhkan seni pertunjukan yang khas buat mereka. Seni pertunjukan semacam itulah yang disebut sebagai seni metamorfosis, atau seni akulturasi, *seni pseudo tradisional*, atau *seni wisata dan seni turistik*¹⁶. Oleh karena komunitas wisata itu adalah komunitas temporer, yang hanya tinggal beberapa hari di daerah tujuan wisata, dan pada umumnya mereka hanya membawa

¹⁶ Drs. Bambang Sunaryo. M.Sc.Ms, 2013, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Gava Media, Yogyakarta, Hal 132-137

uang secukupnya, maka kemasan pertunjukkan yang cocok buat mereka adalah kemasan yang memiliki ciri-ciri berikut :

- a. Tiruan dari aslinya,
- b. Singkat atau padat atau bentuk miniature dari aslinya,
- c. Penuh Variasi,
- d. Ditinggalkan nilai-nilai sakral, magis dan simbolnya,
- e. Harganya terjangkau.

Dalam menikmati pertunjukkan wisata pada umumnya para wisatawan mancanegara yang bertujuan untuk sekedar mendapatkan pengalaman estetis dan bukan untuk menikmatinya dengan penghayatan yang sublim. Ini berarti bahwa di samping pertunjukkan bagi penduduk setempat berlanjut,, hadirnya wisatawan mancanegara yang merupakan komunitas tersendiri. Sekali lagi secara singkat hadirnya industri pariwisata internasional akan memperkaya seni pertunjukkan Indonesia. Inilah dampak positif dari hadirnya di Indonesia, khususnya Kabupaten Mamuju Utara. Meskipun demikian masih harus dikritisi apakah seni wisata yang demikian tidak berdampak terhadap seni tradisional yang lain ?

Menurut Soedarsono dalam bukunya M. Baiqun¹⁷ bahwa “metamorfosis seni yang demikian itu cenderung berwatak komersial dan sekuler. Dalam karya itu, Soedarsono mengatakan “komersialisasi dan sekularisasi adalah dampak modernisasi yang melanda segala sektor kehidupan manusia akibat revolusi industri pada paruh kedua abad ke – 19. Proses komersialisasi dan sekularisasi ini makin menghebat pada abad ke -20.

¹⁷ Ibid baiquni Hal 77

Tanda-tanda komersialisasi dan sekulerisasi mulai muncul ketika para wisatawan mancanegara masih mengharapkan lebih dari itu. Bagaimana caranya agar bisa menikmati pertunjukan setiap harinya. Apabila ingin menyaksikan bentuk-bentuk pertunjukan yang lain, mereka harus menunggu ada upacara adat dan sebagainya. Di samping itu, apabila seni rakyat dijadikan tontonan sekunder, masalah yang dihadapi sangat banyak dan rumit, antara lain siapa yang memikul biaya produksi ? Pada dasarnya kemajuan Pariwisata Kabupaten Mamuju Utara memunculkan kesadaran baru dari kebudayaan itu sendiri, yakni suatu pencerahan budaya; hasil dari pariwisata yang berasal dari kebudayaan Kabupaten Mamuju Utara, sebagian dipergunakan untuk keperluan kebudayaan.

Dampak pariwisata sendiri dapat bersifat positif dan negatif. Mengkritisi beberapa pernyataan yang mencoba menghitung dampak positif dan negatif pengembangan pariwisata ditemukan nilai yang paradoksal, yang kebenaran sejatinya sangat tergantung dari mana orang melihatnya. Dalam pandangan pengamat budaya lokal, meningkatnya peluang sosial dan ekonomi yang demikian tinggi dan cepat berkat adanya pariwisata, pada sisinya yang lain dilihatnya sebagai proses komersialisasi dan sekulerisasi kebudayaan tradisional yang pada waktunya akan menjangkau beberapa aspek kehidupan, budaya, pendidikan dan konsumen, yang juga berjalan cepat. Akibatnya, kecenderungan masyarakat lokal berorientasi materi dan pola hidup konsumtif dianggap fenomena yang menyimpang dan lepas tradisi. Akan tetapi para pebisnis, pengamat dan aktivitas pariwisata mewah melihat fenomena sosial dan budaya seperti itu sebagai dampak positif dari pariwisata, sedangkan pengamat budaya mulai merasakannya sebagai ancaman serius.

Bila pandangan ganda itu dieksplesikan pada kesenian, maka tampak jelas bahwa para seniman dan produser seni telah terbiasa menggunakan pendekatan ekonomi dalam kegiatan keseniannya. Pada waktunya perhitungan-perhitungan ekonomi akan dianggap wajar sepanjang digunakan untukk mememnuhi penciptaan modernitas

Seniman mulai mempertimbangkan biaya produksi kesenian sebagai sumber nafkah. Akan tetapi, pertimbangan dan pendekatan ekonomi dalam kegiatan jasa pariwisata itu akhirnya berimplikasi luas dalam segala aspek kehidupan masyarakat lokal, justru inilah yang perlu diwaspadai.

Selain itu, ketika loyalitas personal mereka terhadap kebudayaannya sendiri akan menipis, maka peran mereka menjadi sangat minimum dalam membina dan mengembangkan kebudayaan Kabupaten Mamuju Utara, lebih-lebih berbagai tekanan sosial dan ekonomi mulai dirasakan. Tekanan sosial itu dapat berwujud fashion dan pola rekreasi setempat yang disenangi banyak orang. Jangan dilupakan pula bahwa pengelembungan kebutuhan komsumtif itu diperkuat dengan bujukan promosi berbagai produk yang seakan—akan membangun pencitraan sosial melalui televisi. Alih-alih meningkatkan citra modernitas, berhadapan dengan tekanan sosial semacam itu kita dapat kehilangan kemanusiaan dalam kondisi baik di tempat kerja maupun di pelosok desa. Retaknya kohesi sosial ini dapat dilihat dari indikasi tindakan anarkis dalam menyelesaikan konflik bernuansa adat, dan fenomena ini harus disebut berulang kali.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan :

1. Potensi pariwisata di Kabupaten Mamuju Utara akan menjadi tempat wisata nasional maupun internasional, jika pengelolaan fasilitas dan publikasi potensi pariwisatanya bisa dikelola dengan baik, sehingga dapat dikenal dan diketahui pada tingkat Nasional maupun Internasional. Hal ini meniscayakan adanya suatu kefokuskan dan pemerintah daerah dan perhatian dari pemerintah pusat untuk membantu mengembangkan Potensi Pariwisata di Kabupaten Mamuju Utara.
2. Publikasi yang efektif oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dan Instansi terkait dapat menarik perhatian para investor untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisatanya, agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, sehingga kesenjangan ekonomi masyarakat dapat teratasi.
3. Jika hal di atas dilakukan secara efisien dan efektif, dapat diprediksikan lima tahun kedepan potensi Pariwisata Kabupaten Mamuju Utara akan menjadi salah satu tempat pariwisata terkenal pada tingkat Nasional maupun Internasional, sehingga dapat dikunjungi oleh para turis local maupun turis asing yang berujung kepada meningkatnya Pendapatan Asli daerah (PAD) dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

B. SARAN

1. Sebaiknya pengembangan Potensi Pariwisata dapat dijadikan sebagai suatu rumusan prioritas utama program kerja pemerintah kota maupun daerah, mengingat pariwisata adalah suatu hal yang sangat diminati masyarakat Nasional maupun Internasional saat ini.
2. Membuka jaringan dengan pemerintah pusat untuk mempromosikan Potensi Pariwisata Kabupaten Mamuju Utara pada tingkat Internasional, melalui duta-duta besar yang berada di setiap negara-negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia.
3. Mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten Mamuju Utara melalui media cetak ataupun elektronik, contohnya menerbitkan bulletin maupun tabloid melalui website.

DAFTAR PUSTAKA

Anom, I Putu, M. Baiquni, dkk, 2011, *Pariwisata berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global; Denpasar, Udayana University Press*

BPS Kab.Mamuju Utara Tahun 2011

Hermawan, Yulius P., 2001, *Aktor, Isu dan Metodeologi : Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional, Graha Ilmu, Yogyakarta*

J, Muljadi. A, 2010, *Kepariwisata dan perjalanan (Lamp.UU tentang Pembangunan Kepariwisata) , Jakarta, Rajawali Pers*

John Naisbitt, 1994, *Global paradox: Mega Trend 2000. Binarupa Aksara, Jakarta*

MS, Bambang Sunaryo. M.Sc. 2013, *Kebijakan pembangunan Destinasi PARIwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Gava Media, Yogyakarta*

Muhammaddun H.Adam, 2007. *Investasi asing diprovinsi Sulawesi Selatan dalam era Otonomi; Sebuah tinjauan hubungan internasiunl, fisp univ. 45 Makassar.*

Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, Dep.Luar Negeri RI,2004.

S.H. Kemal Redindo Syahrul Putera, Dr. hamzah Halim, S.H., M.H.,2010, *Peraturan Daerah : Konsep Teoritis menuju Artikulasi Emoiris, Prenada Media Group, Jakarta*

Wahid Abdul. 2015. *Vovasanggayu. Annora Media Group : Yogyakarta*

Wiratma, Made Leo, dkk. *Membangun Indonesia dari daerah ; Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daerah*, Jica, Kanisius, Yogyakarta

Website :

<http://unwto.org>, diakses tanggal 22 Juli 2016

<http://sarwsfishingsea.blog.com/page/3/> Diakses juli 2016

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Mamuju Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mamuju_Utara) Diakses Juli 2016

<http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/commodityarea.php?ia=7621&ic=25>

12 Diakses Juli 2016

